



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULIATI BARARAH
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
3. NHK : 928222

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.200.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 159 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , Rp. 1.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 326 m2/78 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **420.000.000**

1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **64.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	95.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.779.000.000
III. HUTANG	Rp.	529.131.509
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.249.868.491

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.